

MAKNA JURNALISME DALAM ERA DIGITAL: SUATU PELUANG DAN TRANSFORMASI

MEANING OF JOURNALISM IN THE DIGITAL ERA: AN OPPORTUNITY AND TRANSFORMATION

Djoko Waluyo

Puslitbang Aptika dan IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Telepon 021-3800418 Jakarta 10110

E-mail: djok016@kominfo.go.id

Abstrak – Artikel ini mengulas tentang makna jurnalisme konvensional yang dewasa ini dipraktikkan dalam era digital. Kemajuan teknologi Internet telah membuka peluang yang lebih luas bagi media konvensional untuk memanfaatkan teknologi konvergensi media dan sekaligus mulai bertransformasi untuk berubah sebagai media digital dengan mengkonstruksi kembali kebijakan redaksi, organisasi media, manajemen media, sumber daya manusia hingga sasaran khalayak yang dituju dalam sebagai media baru. Konsep jurnalisme konvensional yang dirumuskan sebagai berita yang melaporkan setelah kejadian, berubah menjadi konsep berita yang melaporkan pada waktu bersamaan peristiwa berlangsung. Media baru bersifat multi-arah, bukan hanya searah. Tidak mempunyai 'khalayak' sehingga tidak ada publik massa. Media baru sangat beragam dalam bentuk dan kontennya. Bahan artikel ini bersumber dari buku-buku dan literatur yang terkait. Analisis dilakukan kualitatif-deskriptif. Diharapkan artikel ini dapat memberi pemahaman lebih jelas mengenai perkembangan jurnalisme dalam era digital yang telah hadir ditengah-tengah masyarakat luas.

Kata Kunci: jurnalisme, internet, konvergensi media.

Abstract – This article reviews the meaning of conventional journalism which is currently practiced in the digital era. Advances in Internet technology have opened wider opportunities for conventional media to utilize media convergence technology and at the same time begin to transform to change as digital media by reconstructing editorial policies, media organizations, media management, human resources to target audiences in new media. The concept of conventional journalism which is formulated as news reporting after the event changes to a news concept that reports at the same time the event takes place. New media is multi-directional, not just in the same direction. Do not have 'audience' so there is no mass public. New media is very diverse in form and content. The material of this article comes from related books and literature. The analysis was carried out qualitative-descriptive. It is hoped that this article can provide a clearer understanding of the development of journalism in the digital era that has been present in the midst of the wider community.

Keywords: journalism, the internet, media convergence.

PENDAHULUAN

Sejak teknologi informasi Internet dikenal dalam masyarakat sekitar tahun 1990-an yang lalu dan dimanfaatkan juga dikalangan media massa, maka dewasa ini mulai tampak dampaknya. Jurnalisme yang dipraktikkan oleh media konvensional, seperti media cetak surat kabar, media radio maupun media penyiaran televisi, sudah mulai ketinggalan zaman. Dari sisi teknologi komunikasi melalui Internet, distribusi berita dapat dilakukan dengan cepat, bahkan real time diterima khalayak dalam media portal berita *online*. Konsep atau definisi berita juga dapat mulai berubah. Definisi sebuah berita, yang

sebelumnya bermakna "melaporkan peristiwa yang telah terjadi," kini berganti makna dengan "melaporkan peristiwa yang sedang terjadi" (Haryanto, 2014). Betapa dahsyat revolusi teknologi informasi ini. Dengan demikian, proses distribusi berita telah mengalami perubahan cepat dan dapat diterima khalayak dengan cepat pula. Teknologi komunikasi melalui internet telah mampu mengirimkan berita hingga ke pelosok daerah atau tempat dimana saja, selama tempat itu diterpa jaringan Internet. Konsep jurnalisme yang konvensional mulai ditambah dengan unsur-unsur yang melibatkan fungsi teknologi komunikasi dengan basis internet. Jurnalisme

telah menghadapi tantangan yang dapat dikatakan sebagai suatu peluang sekaligus upaya bertransformasi dalam era digital.

Artikel ini meninjau jurnalisme konvensional dalam era digital yang sekaligus sebagai sebuah peluang dan transformasi. Fenomena perkembangan media konvensional yang makin merasakan kebebasan sejak memasuki era Reformasi, namun dewasa ini telah terasa dampak dari intensitas Internet dalam masyarakat, yang menghadirkan media *online* atau portal berita yang dapat dengan mudah diakses masyarakat. Kecepatan berita yang disiarkan media *online* telah menjadi tantangan yang demikian menjadikan media massa konvensional makin tertinggal, namun sekaligus juga dapat merubah dirinya dalam konsep konvergensi media berbasis Internet. Korporasi media yang besar telah berhasil mentransformasi dirinya menjadi korporasi media yang meliputi media cetak, media radio, televisi, portal berita dan sebagainya yang berbasis Internet dalam konsep konvergensi media. Sistem pers juga diulas dalam kaitan memberi fokus bahwa jurnalisme yang mempunyai landasan filosofi dan pijakan politik dariteori media dunia. Serta bagaimana peluang untuk segera mentransformasi diri menjadi media yang berbasis Internet.

Rumusan masalah dalam tulisan ini, bagaimana makna jurnalisme dalam era digital sebagai suatu peluang dan transformasi?

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dilakukan secara kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Sumber data dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan fokus masalah dalam artikel ini. Tulisan ini diharapkan dalam perspektif kualitatif dapat memperkuat fakta mengenai pergeseran makna jurnalisme konvensional dalam era digital yang sekaligus merupakan peluang untuk berkembang dengan basis Internet dan mampu mentransformasi diri dari media konvensional menjadi media dalam era digital dalam konsep konvergensi media. Sistematika penulisan berkaitan dengan kebijakan

redaksi, institusi media, manajemen media, sumber daya manusia dan sasaran khalayak media baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Redaksi dalam Sejarah Media Konvensional Kompas

Pengertian terhadap kebijakan redaksi suatu media, diantaranya dapat ditelusuri faktor kesejarahan dari media itu. Proses perjalanan waktu dapat menempa konsistensi dan jurnalisme yang dijalankan oleh media itu. Fakta yang cukup menarik dapat diangkat mengenai perjalanan penerbitan media surat kabar *Kompas*, yang sejak awal terbit dengan teknologi sederhana dan dewasa ini telah memasuki 53 tahun penerbitannya yang telah menggunakan teknologi Internet. Harian *Kompas* yang dikenal luas masyarakat dalam sejarahnya pernah dibreidel penguasa Orde Baru. *Kompas* dewasa ini menjadi koran mainstream, dalam pemberitaannya yang mempunyai komitmen kuat dalam jurnalismenya. Konsep jurnalisme dengan rumusan konvensional 5 W 1 H, telah dilandasi dengan kondisi budaya di lingkungan redaksi yang humanis, kompeten, dan berbasis kemanusiaan. Harian *Kompas* telah mampu berdiri sebagai salah satu bentuk industri media yang cukup berhasil di Indonesia. Suryopratomo (2007) pemimpin redaksi harian *Kompas* mendeskripsikan keberhasilan *Kompas*,” berangkat dengan idealisme yang sangat jelas, kemudian PK Ojong dan Jakob Oetama membangun yang namanya profesionalisme, baik di sisi keredaksian maupun bisnis. Dengan profesionalisme itulah *Kompas* membangun integritas dan meraih kepercayaan. Berbekal kepercayaan dari masyarakat dan pembaca, *Kompas* secara perlahan menorehkan pengaruhnya (*influence*). Baru setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, *Kompas* meraih bisnis. Bahkan bukan sekadar menjadi institusi bisnis tunggal, tetapi multibisnis yang tetap terikat kuat pada idealisme yang terus dipertahankan hingga sekarang”.

Dalam perjalanan waktu yang dapat dikatakan sebagai suatu proses mencari arti jurnalisme pada akhirnya konsep jurnalisme *Kompas* telah dirumuskan sebagai suatu ”jurnalisme makna”. Jakob Oetama, pendiri dan sekaligus penanggung jawab *Kompas*, memberikan pengertian bahwa jurnalisme koran

Kompas disebut dengan jurnalisme makna. Berarti, setiap berita yang disiarkan mempunyai makna bagi pembaca. Lebih luas pandangan jurnalisme makna dijelaskan Jakob Oetama pada waktu memperoleh gelar doktor Honoris Causa (HC) di bidang komunikasi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta (*Kompas*, 17/4/2003), bahwa pencarian makna berita serta penyajian makna berita semakin merupakan pekerjaan rumah dan tantangan media massa saat ini dan di masa depan. Jurnalisme dengan pemaknaan itulah yang diperlukan bangsa sebagai penunjuk jalan bagi penyelesaian persoalan-persoalan genting bangsa ini. Jurnalisme yang diemban wartawan *Kompas* cukup berhasil menaikkan tiras koran tersebut, meskipun perlahan kenaikannya, sebab pemberitaan yang disajikan menganut filosofi kemanusiaan, adil, terpercaya dan independen. Sesuai dengan motto harian *Kompas* "Amanat Hati Nurani Rakyat", yaitu selalu menjaga kepentingan publik dalam pemberitaannya dengan seimbang.

Bila menelusuri sejarah atau perjalanan waktu harian *Kompas*, telah dilalui dengan berbagai tantangan dan hambatan yang pernah dialami, diantaranya yang paling berat dalam perspektif sosial politik, pada masa Orde Baru. Koran *Kompas* pernah dilarang terbit, atau dibredel (tapi sementara) dan bisa terbit kembali, setelah mengakui kesalahannya dan bersikap minta maaf kepada penguasa. Memang pada masa itu intervensi penguasa kepada pers sangat kuat. Sering terjadi pembredelan media (Arismunandar, 2006). Rezim yang berkuasa otoriter, dan sistem pers dibangun cenderung sistem pers otoritarian. Pers diperlakukan sebagai alat propaganda penguasa, padahal penguasa telah mencanangkan bahwa konsep pers yang dirumuskan sebagai pers Pancasila. Yaitu pers Pancasila atau konsep pers pembangunan dengan mekanisme kehidupan persnya adalah berpoli interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. Media diarahkan untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah Orde Baru.

Dalam masa Orde Baru, jurnalisme yang dipakai oleh *Kompas* dikenal sebagai 'jurnalisme kepiting', yakni dikala pemberitaan mengkritik penguasa dan menggigit, maka koran *Kompas* melakukan introspeksi untuk menilai kembali sikap politik pemberitaannya. Seperti kepiting, bila terantuk batu, maka akan mencari jalan lain dengan menghindari batu tersebut.

Pengertian jurnalisme dalam konsep media, berasal dari perkataan *journal*, artinya catatan harian mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari perkataan Latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. MacDougall (dalam Kusumaningrat, 2014) menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting di mana pun dan kapan pun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis. Takpeduli apa pun perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan, baik sosial, ekonomi, politik maupun yang lain-lainnya. Tak dapat dibayangkan, akan pernah ada saatnya ketika tiada seorang pun yang fungsinya mencari berita tentang peristiwa yang terjadi dan menyampaikan berita tersebut kepada khalayak ramai, dibarengi dengan penjelasan tentang peristiwa itu.

Konsep berita yang dianut jurnalisme dewasa ini tampaknya juga mengalami pergeseran, disebabkan makin kuatnya intervensi internet dengan media *online* yang mampu dengan cepat mendistribusikan informasi ke segala arah. Namun demikian dalam definisi berita yang banyak dianut wartawan, menurut Northcliffe (dalam Kusumaningrat, 2014) yang artinya, "kalau anjing menggigit orang, itu bukan berita; kalau orang menggigit anjing, itu baru berita". Dalam konsep berita demikian, maka nilai berita ada unsur luar biasa, dan ditambah unsur lainnya, diantaranya, kebaruan, proximity, akurat, dan menarik perhatian.

Kini memasuki era Reformasi dengan perspektif globalisasi informasi dan komunikasi,

kehidupan sosial dewasa ini berada dalam lingkungan media yang sedang berubah dengan cepat. Hanya beberapa tahun yang lalu, sebagian besar orang tidak pernah mendengar multimedia atau Internet. Sekarang, Anda hampir tidak bisa membaca koran tanpa melihat salah satu atau keduanya. Bahkan koran dalam bentuk media online telah tersaji dengan cepat tiap hari, tiap saat dengan berita yang terus di *update*. Peristiwa di lain tempat secara *realtime* dapat disajikan dalam media *online*.

Kesimpulannya terhadap kebijakan redaksi dari koran Kompas, setelah melalui perjalanan panjang ,dengan faktor profesionalisme dalam praktik jurnalisme makna untuk membangun integritas dan kepercayaan, dapat dianggap, Kompas berhasil senantiasa menyesuaikan kebijakan redaksi atau politik pemberitaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Institusi dan Fungsi Media

Institusi atau lembaga media merupakan substruktur yang hidup dalam suatu struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Menelaah konsep institusi, juga dapat dilihat dari fungsi-fungsi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya sangat memerlukan hadirnya komunikasi massa dalam bentuk media cetak, radio, dan televisi. Apapun bentuknya, komunikasi massa akan terus menerus berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi massa menjadi mata dan telinga bagi masyarakat. Komunikasi massa memberi masyarakat sarana untuk mengambil keputusan dan membentuk opini kolektif yang bisa digunakan untuk bisa lebih memahami diri mereka sendiri. Ia merupakan sumber utama untuk mengembangkan nilai-nilai dalam masyarakat (Severin-Tankard, 2005). Komunikasi massa yang berisi konten atau berita dan informasi disalurkan melalui media massa yang sudah dikenal masyarakat luas.

Dari fenomena kehidupan media dewasa ini, secara sadar ataupun tidak sadar telah terjadi transformasi model bisnis media (termasuk dalam bentuk jurnalistik), sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang maju dengan pesatnya. Serta perkembangan yang paling mutakhir terjadi konvergensi media yang terdiri

dari televisi, radio, media cetak, penerbitan buku, majalah, dan yang terus berkembang dalam lingkup internet dengan model media *online*.

Media yang sudah biasa diakses masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses komunikasi. Adapun pengertian komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana dimulai dengan sejumlah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang untuk mencari data atau menyampaikan informasi yang kemudian dikemas menjadi bentuk pesan untuk kemudian disampaikan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara atau kode tulisan.

Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat, contohnya: pers, radio atau televisi.

Fungsi-fungsi komunikasi massa yang utama, yaitu: penyampaian informasi (*to inform*); pendidikan (*to educate*); hiburan (*to entertain*); mempengaruhi (*to influence*). Sedangkan ciri-ciri komunikasi massa dapat diidentifikasi, sebagai: 1) komunikasi massa berlangsung satu arah; 2) Komunikator pada komunikasi massa melembaga; 3) Pesan pada komunikasi massa bersifat umum; 4) Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan; dan 5) Komunikasi massa bersifat heterogen.

Dari perspektif sosiologis, fungsi media dalam proses komunikasi melakukan aktivitas pokok dalam kehidupan sosial yang diidentifikasi sebagai 3 (tiga) aktivitas pokoknya. Lasswell (dalam Wright, 1988) merumuskan yaitu (1) sebagai pengawasan lingkungan, (2) korelasi antar bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan, dan (3) transmisi warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian Charles R Wright (1988), menambahkan aktivitas komunikasi yang keempat yaitu bentuk *entertainment* (hiburan). Aktivitas komunikasi dalam pengawasan

lingkungan, menunjukkan pengumpulan dan distribusi informasi mengenai kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan, baik di luar maupun didalam suatu masyarakat tertentu. Bentuk informasinya dalam format berita-berita. Dalam beberapa hal, ini berhubungan dengan apa yang dipandang sebagai penanganan berita.

Sedangkan tindakan korelasi, berupa interpretasi informasi mengenai lingkungan dan pemakaiannya untuk berperilaku dalam reaksinya terhadap peristiwa atau kejadian-kejadian tadi. Bentuk dalam media diformalisasikan dalam format editorial atau propaganda. Untuk transmisi warisan sosial (*social heritage*) berfokus pada komunikasi pengetahuan, nilai-nilai dan norma-norma sosial dari satu generasi ke generasi lain atau dari anggota-anggota suatu kelompok kepada para pendatang baru. Pada umumnya aktivitas ini diidentifikasi sebagai aktivitas pendidikan atau edukasi. Dan yang paling akhir, aktivitas hiburan menunjukkan pada tindakan-tindakan komunikatif yang terutama dimaksudkan untuk menghibur, dengan tidak mengindahkan efek-efek instrumental yang dimilikinya. Dengan kata lain, media dalam kehidupan sosial melaksanakan aktivitas sosial dengan makna menjalankan fungsi-fungsi informatif, edukasi, hiburan dan kritik sosial.

Dari perspektif normatif, fungsi-fungsi pers diatur dalam regulasi untuk menata dan mengelola kehidupan sosial yang mendorong peningkatan kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi media telah diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Isi pasal 3 dinyatakan yaitu : (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan *control social*. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1) pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dalam Penjelasan Umum pasal 3 dinyatakan bahwa pers yang juga melaksanakan *social control* sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers

menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi bahwa perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraannya para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Berdasarkan regulasi yang normatif, maka jurnalisme dalam era digital tidak bisa meninggalkan standar normatif media tersebut. Dan jurnalisme digital yang dilakukan juga memperhatikan regulasi yang berlaku bagi pers konvensional, berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode etik jurnalistik yang disahkan Dewan Pers, serta memperhatikan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat ketika mencari, mengolah dan menerbitkan surat kabar.

Empat Teori Media

Jurnalisme dalam era digital, sebagai bentuk media, menurut teori normative media telah mempetakan atau mempolakan empat kategori sistem media berdasarkan pemikiran ilmiah bukan dari hasil riset lapangan (Severin-Tankard, 2005). Sistem pers dunia telah dipetakan sebagai hasil kajian Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam buku Empat Teori Pers (1986), yang mengkategorikan teori-teori pers di dunia dalam empat teori pers, yaitu: teori pers *otoriter*, teori pers bebas, teori pers bertanggungjawab sosial dan teori pers komunis Soviet.

Tesis "Empat Teori Pers" mengasumsikan bahwa pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur sosial politik di mana pers itu beroperasi. Untuk melihat perbedaan dan perspektif di mana pers berfungsi, harus dilihat asumsi-asumsi dasar yang dimiliki masyarakat itu mengenai: hakikat manusia, hakikat masyarakat dan negara, hubungan antara manusia dan negara, hakikat pengetahuan dan kebenaran. Pada akhirnya, perbedaan antara sistem pers merupakan perbedaan filsafat yang mendasarinya.

Teori pers *otoriter*, diakui sebagai teori pers paling tua, berasal dari abad ke-16, berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut. Penetapan tentang “hal-hal yang benar” dipercayakan hanya kepada segelintir “orang bijaksana” yang mampu memimpin. Jadi, pada dasarnya, pendekatan dilakukan dari atas ke bawah. Pers harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdikan kepada negara. Para penerbit diawasi melalui paten-paten, izin-izin terbit dan sensor. Konsep ini menetapkan pola asli bagi sebagian besar sistem-sistem pers nasional dunia, dan masih bertahan sampai sekarang. Sebagian besar dunia selama beberapa periode telah menerima prinsip-prinsip dasar otoritarianisme sebagai pedoman tindakan-tindakan sosial, dan telah dipakai dalam pengawasan, pengaturan dan penggunaan media komunikasi massa. Walaupun teori *otoriter* telah dibuang di banyak negara demokratis, tetapi praktik-praktik otoritarian cenderung mempengaruhi proses demokrasi. Bahkan, praktek *otoritarian* hampir memaksa pemerintah libertarian mengambil langkah-langkah balasan beberapa aspek tidak dapat dibedakan dengan cara-cara *otoritarian*.

Teori pers *libertarian* atau teori pers bebas merupakan teori pers kedua. Teori ini mencapai puncaknya pada abad ke 19, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran. Kemudian berkembang pandangan dalam teori ini, pers perlu mengawasi pemerintah. Dari sini atribut pers sebagai “*the fourth estate*” setelah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadi umum diterima dalam teori pers libertarian. Oleh karenanya, pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Dalam upaya mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap. Teori ini paling banyak memberi landasan kebebasan yang tak terbatas kepada pers. Disini pers bebas paling banyak

memberi informasi, hiburan dan tirasnya naik, namun pers bebas juga paling sedikit berbuat kebijakan menurut ukuran umum dan sedikit mengadakan kontrol terhadap pemerintah (Hikmat Kusumaningrat, 2006). Dalam perusahaan pers yang menganut teori pers bebas, sebagian besar aturan yang ada hanyalah untuk menciptakan keuntungan berupa materi bagi pemilik modal. Pers jenis ini cenderung kurang sekali tertarik pada soal-soal bagi kepentingan masyarakat.

Dua teori lainnya, *social responsibility theory* (teori pers bertanggungjawab sosial) dan *Soviet communist theory* (teori pers komunis Soviet) dipandang sebagai modifikasi yang diturunkan dari kedua teori sebelumnya. Teori pers bertanggung jawab sosial dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam pers bebas, para pemilik dan para operator pers yang terutama menentukan fakta-fakta apa saja yang boleh disiarkan kepada publik (fungsi *gatekeeper*) dan dalam versi apa (fungsi *framing* berita). Teori pers libertarian tidak berhasil memahami masalah-masalah proses kebebasan internal dan proses konsentrasi pers. Teori pers bertanggungjawab sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggungjawab sosial. Rumusan ini dimuat dalam laporan *Commission on the Freedom*, 1949, dengan ketua Robert Hutchins.

Ada 5 (lima) syarat bagi pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat, yaitu:

1. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna.
2. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik.
3. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat.
4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat.

5. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.

Pengaruh laporan komisi tersebut sedikit banyak memberi warna terutama seputar tuntutan masyarakat Amerika agar pers untuk lebih memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Baru tahun 1956, pers Amerika mulai meninggalkan prinsip-prinsip teori pers libertarian dan bergeser ke pers yang bertanggungjawab sosial. Inilah bentuk kebebasan pers yang dikehendaki masyarakat Amerika yaitu kebebasan yang selalu dengan syarat terhadap kewajiban-kewajiban pers kepada masyarakat. Fungsi mendidik media massa perlu diberi ruang dan bobot yang lebih. Jangan hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga menterjemahkan dengan tepat dari idealismenya (Sinansari Ecip, 2000:77).

Siebert dkk, dalam bukunya *Empat Teori Pers* menetapkan 6 (enam) fungsi pers dalam sistem pers yang bertanggungjawab sosial, yaitu:

1. Melayani sistem politik yang memungkinkan informasi, diskusi dan konsiderasi tentang masalah-masalah publik dapat diakses oleh masyarakat.
2. Memberikan informasi kepada publik untuk memungkinkan publik bertindak bagi kepentingannya sendiri.
3. Melindungi hak-hak individu dengan bertindak sebagai *watch dog* terhadap pemerintah.
4. Melayani sistem ekonomi dengan adanya iklan dalam media, mempertemukan pembeli dan penjual.
5. Memberikan hiburan yang baik, apapun hiburan itu dalam media.
6. Memelihara otonomi dibidang finansial agar tidak terjadi ketergantungan kepada kepentingan-kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu.

Teori pers bertanggung jawab sosial ini merupakan teori baru dan memberikan banyak informasi dan menghimpun segala gagasan atau wacana dari segala tingkatan kecerdasan. Teori

ini tidak disukai oleh pers bebas atau libertarian, yakni menjalankan etika pers dan menjamin suara minoritas atau oposisi dalam pemberitaannya. Teori bertanggung jawab sosial banyak dianut negara berkembang dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif maju.

Teori keempat, *the Soviet communist theory*, baru tumbuh 2 tahun setelah Revolusi Oktober 1917 di Rusia. Akar teori ini dari *authoritarian theory*. Sebanyak 10 dari 11 negara yang dulu berada dalam USSR menganut sistem ini, sehingga tidak terdapat pers bebas yang ada hanya pers pemerintah. Dengan bubarnya Uni Soviet 25 Desember 1991, negara-negara tersebut sekarang telah melepaskan sistem politik komunisnya. Kini teori pers komunis hanya dianut oleh Republik Rakyat China (RRC). Ciri-ciri teori pers Soviet komunis: a) Dihilangkannya motif profit, b) Menomorduakan topicalitas berita, c) Mempertahankan status *quo* bagi penguasa.

Empat teori pers dunia ini dapat dijadikan arah kecenderungan dari politik pemberitaan media, di negara mana media tersebut beroperasi. Perkembangan jurnalisme dalam era digital, juga menganut kecenderungan salah satu dari Empat Teori Pers dunia tersebut. Jurnalisme yang diterapkan oleh media di Indonesia lebih cenderung menganut teori libertarian, sejak memasuki era Reformasi.

Dalam perspektif praktis, pedoman wartawan dalam menjalankan praktik jurnalisme berorientasi pada kode etik jurnalistik dan norma-norma sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakatnya. Dewasa ini pandangan jurnalisme dapat juga menelaah pada sumber orientasi wartawan yang diambil dari "Sembilan elemen jurnalisme" yang mengandung nilai-nilai idealisme dalam praktik kewartawanan.

Sembilan elemen jurnalisme terdiri dari: (1) Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Wartawan sangat memegang teguh nilai kebenaran dari berita dan tidak memanipulasi negatif dalam pemberitaannya. Kemudian (2) Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Masyarakat sebagai

subjek berita yang bakal menikmati berita-berita yang disajikan media, maka orientasi pemberitaannya harus kepada masyarakat.

Elemen selanjutnya yang ke (3) Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Wartawan dalam bekerja sangat mengutamakan verifikasi fakta-fakta untuk disajikan sebagai berita dalam media, sehingga tidak membingungkan atau menyesatkan bagi masyarakat. Elemen ke (4) Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Disini wartawan tidak terpengaruh oleh pihak lain untuk memberitakan fakta yang ada, maka wartawan harus independen dan menjaga kredibilitas terhadap sumber berita. (5) Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. Peran ini amat berat dan penuh konflik kepentingan antara media dengan penguasa yang orientasi utamanya semuanya kepada publik, namun dengan 'politik' atau sudut pandang yang berbeda. Sedangkan elemen jurnalisme selanjutnya yang ke (6) bahwa jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Media wajib berorientasi kepada kepentingan publik, bukan semata-mata kepada pemilik modal atau pemasang iklan. Perlu ada keseimbangan antara kepentingan publik dengan pasar. Elemen yang ke (7) bahwa jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan. (8) Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional. Dan elemen jurnalisme ke (9) bahwa praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka (Kovack, 2006). Dari elemen-elemen jurnalisme itu, maka yang paling penting bahwa jurnalisme mengungkapkan kebenaran dalam beritanya, obyektif, dan menjalankan fungsi kontrol pada kekuasaan dan sebagai media ruang publik.

Jurnalisme dalam era digital berlandaskan pada kode etik jurnalistik yang telah disahkan Dewan Pers serta dapat ditambah dengan pandangan dari Sembilan Elemen Jurnalisme yang dirumuskan Bill Kovach dan Tom Rosentail (2006), keduanya wartawan Amerika Serikat. Nilai-nilai jurnalisme dewasa ini yang telah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi

komunikasi makin masif pemanfaatannya dalam masyarakat luas.

Bentuk jurnalisme dalam era digital yang banyak dikenal dalam masyarakat, seperti portal berita detik.com, kompas.com dan sebagainya. Secara formal portal berita atau dalam peraturan Dewan Pers disebut sebagai media siber, pemunculannya berdasar pada pemikiran sebagai ungkapan kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Wartawan sebagai sumberdaya manusia yang melakukan kegiatan jurnalistik dengan re-orientasi terhadap elemen jurnalisme tentunya memerlukan bentuk manajemen media yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan khalayak terhadap media dalam era digital.

Media siber memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers pengelola media siber dan masyarakat telah menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber. Materi isinya hampir sama dengan pedoman pemberitaan untuk media cetak surat kabar dan majalah berita mingguan. Yang membedakan pada mediumnya, yang mempunyai karakteristik berbeda pada masing-masing media. Dan teknologi yang digunakan pada media siber bersifat konvergensi yang dapat menampilkan materi data, gambar dan suara serentak.

Data Dewan Pers ternyata di Indonesia tercatat sekitar 1.755 situs berita tahun 2017. Namun menurut ketentuannya bahwa suatu portal berita atau media siber harus merupakan suatu

badan hukum, mempunyai alamat redaksi yang jelas, terdapat susunan redaksi atau pengelolanya, termasuk wartawannya, dan mempunyai manajemen pengelola yang sehat secara ekonomis. Bila situsnya tidak jelas alamatnya, diantaranya, maka bukan merupakan situs legal yang informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagaimana makna jurnalisme dalam era digital dapat dicermati pada praktik media siber dewasa ini? Dosen Fisipol Universitas Gajah Mada, Kuskridho Ambardi, PhD, dalam presentasinya bertajuk *Digital Journalism: The Contemporary Experience and Views of Indonesian Journalists* di Yogyakarta, (06/09/2017) menjelaskan bahwa tingginya jumlah situs berita secara tidak langsung memperingatkan kita sebagai *audience* untuk siap menghadapi arus informasi dan kritis dalam mengkonsumsinya. Ada 5 (lima) tren yang mewarnai media berita siber di Indonesia. Pertama, penekanan pada aspek kecepatan. Kedua, *truth in the making*. Ketiga, kecenderungan *sensationalism is a menu of the day*. Keempat, masih bersifat Jakarta sentris. Kelima, media siber di Indonesia seringkali mempraktikkan cara kerja *public relations* dan memelintir suatu isu. Kelima tren tersebut menjadi poin-poin utama yang dapat kita gunakan sebagai kritik dalam mengonsumsi berita media siber. Masih banyak konten media siber yang memuat sensasionalitas berlebihan. Baik untuk tujuan bisnis produknya ataupun untuk tujuan lain.

Audien yang mengakses berita dari media siber memang dituntut untuk kritis, jangan menerima atau mempercayai berita tersebut dengan segera, namun perlu direnungkan dan dipikir ulang, apakah konten berita memang benar atau hoax. Edukasi kepada khalayak tampaknya diperlukan agar masyarakat dengan cerdas dan bijaksana dalam mengonsumsi berita-berita dari media siber. Dan perlu diperhatikan, status media siber tadi apakah legal sebagai media yang telah di verifikasi oleh Dewan Pers atau media siber abal-abal yang

terlihat dari berita-beritanya yang sensasional dan provokatif.

Dalam buku *Sembilan elemen jurnalisme*, yang paling pokok, bahwa jurnalisme itu harus mengutamakan konten untuk kepentingan publik. Orientasi pemberitaannya kepada masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian jurnalisme dalam era digital harus tetap berlandaskan pada prinsip jurnalisme yang baku dan universal, diantaranya rumus berita 5 W 1 H, serta kode etik jurnalistik yang telah disahkan oleh Dewan Pers. Dari segi teknologi yang telah menggunakan konvergensi media, maka dituntut bagi media konvensional perlu segera mentransformasi diri menjadi media siber yang berkualitas untuk kepentingan publik. Transformasi yang diperhatikan dalam jurnalisme dalam era digital, media baru bersifat multi-arah, bukan hanya searah. Tidak mempunyai 'khalayak' sehingga tidak ada publik massa. Media baru sangat beragam dalam bentuk dan kontennya (McQuail, 2011). Dengan demikian jurnalisme di era digital yang bakal muncul dengan ciri-ciri kecepatan multi, multiarah dan berita yang ringkas.

KESIMPULAN

Dalam mengikuti perkembangan teknologi komunikasi, jurnalisme dalam era digital menangkap peluang yang berkembang, diantaranya melakukan konvergensi media dan mentransformasi diri menjadi media *online* dalam era digital. Teori-teori media di dunia menjadi pijakan dan sumber filosofi untuk membangun arah pemberitaan berdasarkan politik pemberitaan redaksi dari media tersebut. Jurnalisme yang dipraktekkan oleh para jurnalis bertumpu pada regulasi, kode etik jurnalistik dan juga perkembangan pandangan masyarakat dari akibat perkembangan zaman dengan hadirnya era digital. Era digital telah membawa perubahan terhadap praktik jurnalisme konvensional menjadi jurnalisme media digital yang karakteristiknya pengolahan berita yang cepat, distribusi yang cepat pula untuk sampai kepada khalayak dan dapat dipercaya. Media *online* atau media siber

yang dapat dipercaya telah melakukan verifikasi lembaga pada Dewan Pers dan bertindak sebagai media siber yang resmi.

Era digital dewasa ini telah memberikan peluang bagi media untuk segera melakukan transformasi menjadi media siber dengan bentuk korporasi media menjadi konvergensi media.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kesempatan yang diberikan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar, Satrio. (2006). "Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Sebuah Refleksi Perlawanan Jurnalis Terhadap Penguasa Orde Baru", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Volume 10, Nomor 2 (Juli-Desember 2006).
- Ecip, S. Sinansari (2000). "Masih Bisakah Berharap pada Media Massa", dalam Nasionalisme Perburuan Tanpa Tepi. Jakarta: Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.
- Haryanto, Ignatius (2014). *Jurnalisme Era Digital- Tantangan Industri Media Abad 21*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Satria. (2017). "Jurnalisme di Era Digital sebagai Transformasi sekaligus Tantangan". Diakses tanggal 06 Juli 2018 dari <https://ugm.ac.id/id/news/14661-%20jurnalisme.di.era.digital.sebagai.transformasi.sekaligus.tantangan>
- Suryopratomo (2007). "Profesionalisme untuk Membangun Integritas dan Kepercayaan", dalam St.Sularto (ed) Kompas Menulis dari Dalam. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama K (2006). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Kompas, 17 April 2003.
- Kompas, Edisi 17 April 2003.
- Kovach, Bill dan Tom Rosentail. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Terjemahan Yusi A.Pareanom. Jakarta: Yayasan Pantau.
- McQuail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. McQuail Edisi 6 Buku 2. Terjemahan Putri Iva Izzati, Jakarta : Salemba Humanika.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Siebert, Fred .S, T Peterson dan W.Schramm. (1986). *Empat Teori Pers*, alih bahasa Putu Laxman S. Pedit. Jakarta: Intermedia.
- Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr (2005). *Teori Komunikasi- Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Edisi Kelima, Jakarta: Kencana.
- Wright, Charles R. (1988). *Sosiologi Komunikasi Massa*, terjemahan disunting oleh Jalaluddin Rakhmat. Bandung: Remaja Karya.